

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu yang menjadi persoalan mendasar bagi pemerintahan di negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan menjadi gambaran suatu kehidupan berbagai negara berkembang dalam mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Permasalahan kemiskinan diakibatkan oleh suatu kondisi nasional pada negara dan situasi global. Persoalan mengenai kemiskinan begitu kompleks sehingga membutuhkan perhatian serta intervensi dari berbagai pihak yang dilakukan secara bersama dan terkoordinasi. Sehingga apabila kemiskinan hanya disentuh dan upaya untuk penyelesaiannya hanya dilakukan oleh sedikit pihak tanpa adanya koordinasi yang efektif, maka hal tersebut akan menjadi terasa berat dan tidak mudah.

Kemiskinan merupakan sebagian besar masalah yang dihadapi seluruh belahan dunia terutama kerap terjadi pada negara berkembang. Kemiskinan terjadi bukan hanya bersangkutan dengan orang yang tidak mampu untuk mencukupi hidupnya secara layak maupun tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya namun juga bersangkutan dengan adanya suatu ketimpangan pada penghasilan antar masing-masing penduduk (Hudiyanto, 2014).

Persoalan kemiskinan tidak hanya terjadi pada ketimpangan serta pengangguran melainkan juga merupakan salah satu masalah klasik yang besar serta mendasar untuk negara-negara berkembang di dunia misalnya seperti negara Indonesia. Ada beberapa ahli dalam bidang ilmu ekonomi dan sosial yang telah

mengembangkan dan menciptakan formulasi dengan membuat berbagai jenis indikator dan parameter digunakan untuk menghitung pada jumlah penduduk dan mengukur tingkat kemiskinan berbagai negara (Hudaya, 2009).

Banyak negara yang berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga optimal dan mengurangi angka kemiskinan. Namun kondisi yang tidak tercapai pada negara-negara berkembang misalnya Indonesia, karena pada saat terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi disisi lain juga akan diiringi masalah meningkatnya jumlah penduduk yang hidup pada bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, akan dilakukan upaya secara menyeluruh dalam menanggulangi kemiskinan terutama penyebab kemiskinan tersebut. Ada beberapa faktor upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang harus disempurnakan, seperti peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan dan memperluas lapangan pekerjaan. Sehingga dengan dilakukannya pembangunan yang bertujuan mewujudkan kemakmuran pada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan misalnya kemiskinan, dan pembangunan dilakukan menurut keutamaannya serta kebutuhan pada masing-masing daerah dengan tujuan pembangunan nasional yang sudah ditetapkan pada jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam Anatomi kemiskinan (2013), suatu tindakan pemerintah yang sudah dilakukan beberapa waktu dalam menurunkan tingkat kemiskinan hanya sebatas langkah untuk konteks pendekatan ekonomi yang beroperasi, sehingga pada program rencana pembangunan yang sudah di rencanakan belum beroperasi sesuai dengan rencana, ada kesan yang kuat untuk cara pandang pemerintah dalam

upaya problematika kemiskinan yang terjadi, meskipun sekadar mendapatkan gambaran apabila masalah yang terjadi saat ini hanya sebatas persoalan tingkat pendapatan yang rendah. Seperti halnya saat ini terdapat berbagai macam program pemerintah umumnya yang hanya sebatas menyokong bantuan dalam bentuk modal, subsidi dan sebagainya (Karniji dkk, 2000).

Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar dalam kategori negara berkembang. Di negara Indonesia, jumlah penduduk miskin yang dimiliki tercatat masih banyak dan sebagian besar masyarakatnya bertempat tinggal di perdesaan namun akses yang dimiliki sangat sulit, sedangkan di daerah perkotaan Jawa Barat penduduk miskin yang tinggal disana tersebar cukup banyak.

Dalam al-qur'an dikelompokkan berbagai bentuk kata untuk pengungkapan miskin, yaitu *mushaf*, makiah, tertib *nuzul*, serta madaniah. Pada surah Ar-Rum [30/84]: 38 berbunyi:

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجَهَ اللّٰهِ ۖ وَأَوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.”

Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan Indonesia dimana pembangunannya pada wilayah ini terbilang relatif cepat saat ini jika harus dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Dibalik pembangunan yang

cepat, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa terhitung lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya (Ardianto, 2016).

Pusat pembangunan ekonomi yang terletak di Pulau Jawa, tidak lepas dari masalah kemiskinan. Pada data Badan Pusat Statistik mengenai persoalan kemiskinan di Indonesia terutama pada Pulau Jawa, seperti di DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan saat ini pertumbuhan ekonomi yang berada di Pulau Jawa hanya dirasakan berbagai golongan masyarakat tertentu dan tidak menyeluruh ke semua masyarakat.

Pada tabel 1.1 di bawah ini menyatakan persentase penduduk miskin yang berada di Pulau Jawa tahun 2013-2017. Secara umum data di atas dari tahun 2013 sampai 2017 persentase penduduk miskin di Pulau Jawa pada setiap tahunnya mengalami penurunan.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2013-2017

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
DKI Jakarta	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78	3,79
Jawa Barat	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	8,99
Jawa Tengah	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23	13,35
DI Yogyakarta	15,03	14,55	13,16	13,10	12,36	13,64
Jawa Timur	12,73	12,28	12,28	11,85	11,20	12,07
Banten	5,89	5,51	5,75	5,36	5,59	5,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2018, Diolah

Rata-rata persentase penduduk miskin di Pulau Jawa yang tertinggi terletak di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 13,64 persen, sedangkan rata-rata

persentase penduduk miskin yang terendah terletak di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,79 persen. Rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,35 persen. Provinsi Jawa Timur rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 12,07 persen, sedangkan pada Provinsi Banten rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 5,62 persen. Provinsi Jawa Barat rata-rata persentase penduduk miskin yang dimiliki sebesar 8,99 persen, dimana terletak pada urutan terbesar ke empat setelah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sedangkan pada tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan rata-rata kemiskinan nasional tahun 2013-2017, dimana rata-rata kemiskinan nasional ini diambil dari 34 Provinsi yang terletak di Indonesia. Jika dibandingkan rata-rata kemiskinan nasional dengan Provinsi Jawa Barat, maka akan terlihat bahwa kemiskinan yang di Jawa Barat di bawah rata-rata kemiskinan nasional. Pada tahun 2013 Provinsi Jawa Barat kemiskinannya mencapai 9,61 persen sedangkan rata-rata kemiskinan nasionalnya sebesar 11,47 persen, tahun 2014 Provinsi Jawa Barat mencapai 9,18 persen sedangkan untuk rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10,96 persen, tahun 2015 meningkat mencapai 9,57 persen sedangkan rata-rata kemiskinan nasional 11,13 persen, tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 8,77 persen sedangkan rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10,70 persen, dan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7,83 persen sedangkan rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen.

Tabel 1. 2 Rata-rata Kemiskinan Nasional Tahun 2013-2017

Tahun	Rata-rata Kemiskinan Nasional (%)
2013	11,47
2014	10,96
2015	11,13
2016	10,70
2017	10,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Menurut Badan pusat Statistik rata-rata pada jumlah penduduk miskin yang berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.288,52 ribu jiwa, sedangkan rata-rata pada persentase penduduk miskin sebesar 9,02 persen.

Keberhasilan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berada di Provinsi Jawa Barat menunjukkan pengaruh positif. Sehingga dapat dilihat melalui tabel 1.3 di bawah ini pada jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Jawa Barat untuk setiap tahunnya mengalami penurunan.

Tabel 1. 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	4.375,17	9,61
2014	4.238,96	9,18
2015	4.435,70	9,53
2016	4.224,32	8,95
2017	4.168,44	7,83

Sumber: BPS Prov. Jawa Barat 2018, Diolah

Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 4.375,17 ribu jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 9,61 persen, tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 4.238,96 ribu jiwa dan mengalami penurunan sebesar 9,18 persen, namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 9,53 persen dengan jumlah penduduk miskin yang dimiliki sebanyak 4.435,70 ribu jiwa, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 8,95 persen dan jumlah penduduk miskinnya

sebanyak 4.224,32 ribu jiwa, dan mengalami penurunan lagi hingga 7,83 persen pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.168,44 ribu jiwa.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya yaitu, PDRB. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk keberhasilan dalam pembangunan dan syarat keharusan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Terdapat syarat kecukupannya yaitu apabila pertumbuhan ekonomi terbilang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dimana apabila pertumbuhan bermaksud untuk menyebar pada setiap golongan pendapatan, terutama pada golongan penduduk miskin. Untuk secara langsung, hal tersebut bahwa pertumbuhan perlu dibuktikan yang terjadi di sektor-sektor pada saat penduduk miskin bekerja yakni sektor pertanian maupun sektor yang pada kerja. Sedangkan untuk secara tidak langsung, dibutuhkan pemerintah yang cukup efektif untuk mendistribusikan manfaat pertumbuhan sehingga didapatkan dari sector modern misalnya jasa yang padat modal (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008).

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Di bidang pendidikan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan suatu kemampuan bagi negara berkembang ketika menyerap ilmu dalam mempergunakan teknologi modern serta mengembangkan kapasitas untuk terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan secara vital dimana input berfungsi dalam produk agregat (Todaro, 2011). Pendidikan mampu mempengaruhi sebagian besar pendapatan orang-orang yang berpendidikan serta meningkatkan nilai produksi pada suatu perekonomian. Apabila semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan berpengaruh

pada pendapatan yang nanti diterimanya. Sementara itu, pendidikan juga berpengaruh terhadap seseorang yang mampu membaca, berpendapat, berkomunikasi serta orang tersebut akan lebih dipertimbangkan untuk orang lain dan sebagainya. Sehingga pendidikan sangatlah berperan penting dalam upaya pembangunan perekonomian (Todaro, 2011).

Selain pendidikan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yaitu belanja daerah. Bahwa belanja modal, belanja pegawai serta belanja barang dan jasa menjadi bagian dari belanja yang akan mendukung adanya kegiatan pembangunan, dimana salah satunya merupakan upaya untuk pengentasan kemiskinan. Penurunan dari jumlah kemiskinan menjadi salah satu kebijakan dari program nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cepat (Riko Tri Fasholla, 2018).

Faktor lain yang dapat menyebabkan pengaruh terhadap kemiskinan yaitu DAU. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah dengan membiayai kebutuhan untuk pengeluaran pemerintah daerah yang menjadi pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya Dana Alokasi Umum pemerintah daerah menggunakannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan, Provinsi Jawa Barat termasuk relatif bagus dibandingkan rata-rata nasional kemiskinan. Upaya yang dapat diterapkan untuk menurunkan tingkat

kemiskinan perlu diketahuinya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, sehingga akan memperoleh rumusan suatu kebijakan secara efisien dalam menanggulangnya.

Berdasarkan fenomena keberhasilan kemiskinan yang ada di Jawa Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2017, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan mengajukan penelitian yang berjudul **“Determinan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat bagi penelitian ini yang kiranya dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Sebagai bentuk gambaran bagi pemerintah di Provinsi Jawa Barat mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan dengan merancang kebijakan hingga proses pengambilan keputusan untuk pembangunan ekonomi daerah maupun nasional dan menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam mengetahui pembahasan mengenai kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi.